



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR ~~176~~ TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANAHAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANAHAN TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
 - c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. PENUTUP.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 Agustus 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1516

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024



DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Pertanahan Kota Batam disusun sebagai bahan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2024 yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kota Batam secara signifikan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini menjadi acuan seluruh bidang di lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batam sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini disusun, dan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

Batam, 12 Juli 2024

Kepala Dinas Pertanahan
Kota Batam,



Nurzalie, AP., S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 197302061993111001

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang.....	1
1.2.	Landasan Hukum.....	3
1.3.	Maksud dan Tujuan.....	6
1.4.	Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023.....	8
2.1.	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pertanahan Kota Batam Sampai Triwulan II.....	8
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN	18
3.1.	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD.....	18
3.2.	Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023.....	20
3.3.	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	29
BAB IV	PENUTUP.....	40

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah yang dituang dalam bentuk dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun mendatang.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diserahkannya beberapa kewenangan pusat kedaerah melalui Kepres No 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, maka Pemerintah Kota Batam membentuk Dinas Pertanahan Kota Batam yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam. Dinas Pertanahan Kota Batam mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanahan daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan peraturan tersebut maka disusunlah program kerja dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Batam yang tersusun dari Perubahan Rencana Kerja (Renja) dalam hal ini Dinas Pertanahan Kota Batam. Program atau kegiatan yang ada diharapkan dapat memberikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dan sekaligus memotivasi dan memberi semangat yang senantiasa mewarnai pola pikir dan langkah dalam bidang pertanahan. Dengan program tersebut diharapkan seluruh komponen baik pegawai maupun pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan program-program Dinas Pertanahan serta hasil yang ingin dicapai pada waktu yang akan datang. Wujud pembangunan tersebut diaktualisasikan dalam bentuk program kerja tahunan yang diimplementasikan dalam bentuk Renja Dinas Pertanahan Kota Batam.

Dalam rangka penyelarasan kebijakan dibidang pertanahan, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, agar dapat mempercepat pelaksanaan sasaran prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam, program di Dinas Pertanahan sebagaimana juga telah diuraikan dalam Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penatagunaan Tanah

Bahwa tingkat keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintahan dan pembangunan di daerah ditentukan oleh tingkat kualitas perencanaannya, hal ini disebabkan perencanaan tersebut menentukan langkah daerah untuk menghadapi masa depan dengan antisipasi dan tindakan yang tepat.

Renja (Rencana Kerja), Renstra (Rencana Strategis), dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah konsep perencanaan yang sering digunakan dalam konteks pemerintahan di Indonesia.

RPJMD merupakan rencana pembangunan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan pembangunan daerah dalam jangka menengah, biasanya dalam rentang waktu 5 tahun. Renstra adalah dokumen yang lebih rinci, menjelaskan strategi dan langkah-langkah operasional yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Sementara itu, Renja adalah rencana kerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran, yang didasarkan pada Renstra. Renja merinci tugas-tugas, kegiatan, dan proyek yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, serta alokasi sumber daya yang diperlukan.

Dengan demikian, hubungan antara ketiganya adalah bahwa RPJMD menetapkan visi jangka menengah dan arah pembangunan daerah, Renstra menguraikan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan dalam RPJMD, dan Renja menjelaskan rencana kerja tahunan yang diambil dari Renstra.

Untuk itu perlu di susun suatu Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam, yang meliputi kebijakan Pemerintah dan Anggaran termasuk di dalamnya Perencanaan, Pengawasan dan Monitoring serta pemasukan sumber daya keuangan dalam jangka waktu satu tahun mendatang.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini menggunakan landasan peraturan perundangan antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
- 2) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- 14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
- 15) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 19) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023;
- 22) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
- 23) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- 24) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);

- 25) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- 26) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 121);
- 27) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
- 28) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja di Lingkungan Dinas Pertanahan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1157);
- 29) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1192);
- 30) Peraturan Wali Kota Nomor Nomor 84 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1424).

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Dinas Pertanahan Kota Batam dalam rangka menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun Anggaran 2024.

B. Tujuan

Tujuan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2024 adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan Tahun 2024 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan terdiri dari 4 (empat) bab dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja PD Sampai Triwulan II

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD
- 3.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024
- 3.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (hasil inputan SIPD)

BAB IV PENUTUP

B A B II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pertanahan Kota Batam Sampai Triwulan II

Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana Strategis Tahun 2021-2026 ditetapkan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, serta pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran, yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja. Penetapan indikator kinerja kegiatan berdasarkan pada kelompok masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembangunan Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2021-2026, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dituangkan dalam bentuk formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Perubahan Rencana Kerja adalah mencakup pelaksanaan 2 program 6 kegiatan dan 14 Sub kegiatan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dituangkan dalam bentuk formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Perubahan Rencana Kerja adalah mencakup pelaksanaan pada 2 program sebagaimana diuraikan diatas.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2023, telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanahan Kota Batam dalam APBD dan APBDP Kota Batam tahun 2023 sebesar Rp 7.828.264.328,- (Tujuh miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) yang dijabarkan dalam DPPA, yang terbagi dalam 6 (enam) kegiatan dengan 14 (empat belas) sub kegiatan. Realisasi kegiatan sampai dengan bulan akhir bulan Desember tahun 2023 adalah Rp 7.174.746.191,- (Tujuh miliar seratus tujuh puluh

empat juta tujuh ratus empat puluh enam seratus sembilan puluh satu rupiah).

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2024, telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Dinas Pertanahan Kota Batam dalam APBD Kota Batam tahun 2024 sebesar Rp Rp. 7.525.606.635,- (Tujuh miliar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang dijabarkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), yang terbagi dalam 2 (dua) program, 5 (lima) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan dan sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp. Rp. 3.544.746.949,- (Tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) atau 48,41% (empat puluh delapan koma empat puluh satu persen).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi 5 (lima) kegiatan yaitu (1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 5.406.224.628,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp. 5.282.999.834,- atau 97,72% dan realisasi fisik 99,96%, (2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 129.678.000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp. 98.132.780,- atau 75,67% dan realisasi fisik 98,90%. (3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 247.962.500,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp. 202.685.761,- atau 81,74% dan realisasi fisik 86,54%. (4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 529.302.900,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp. 502.600.000,- atau 94,96% dan realisasi fisik 100,00%. dan (5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 178.035.000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp. 173.132.100,- atau 97,25% dan realisasi fisik 99,16%.

- b. Program Penatagunaan Tanah meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota yang dianggarkan sebesar Rp. 1.337.061.300,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp. 915.195.716,00 atau 68,45% dan realisasi fisik 74,63%.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan pencapaian Renstra Dinas Pertanahan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH (PD)
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan

1	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPKD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KETERANGAN				
								SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10						11			12		13		14						14				
		DINAS PERTANAHAN								53,196,939,782			7,174,746,191			6,875,335,834			8,005,491,569		7,525,606,635		1,071,478,873		3,544,746,949.00		3,544,746,949.00	#DIV/0!	47.10					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										#DIV/0!	#DIV/0!					
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																										#DIV/0!	#DIV/0!					
	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah					%	100	42,543,869,779	%	99.26	6,259,550,475	%	100	5,827,590,936	%	100	6,888,200,169	100%	6,377,260,835	12.39%	1,041,868,067		3,375,275,037.00		3,375,275,037.00	0.00	52.93					
	2.10.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi keuangan yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah			%	100	37,063,259,195	%	100	5,282,999,834	%	100	5,209,116,638	%	100	6,254,568,669	100%	5,908,564,335	20.41%	966,108,567		3,155,421,437.00		3,155,421,437.00	0.00	53.40					
	2.10.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					Orang/bulan	27	5,247,079,834	Orang/bulan	27	5,173,196,638	Orang/bulan	392	6,214,648,669	392 orang/bulan	5,908,564,335	80	966,108,567	228.00	3,155,421,437.00	228.00	3,155,421,437.00	58.16	53.40					
	2.10.01.2.02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Dokumen	1	35,920,000	Dokumen	1	35,920,000	Dokumen	1	39,920,000	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00!	belanja honorarium verifikator keuangan telah digabung ke sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				

1	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KETERANGAN
								SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	TW 1		TW 2		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
																						KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10						11			12		13		14						14
	2.10.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi kepegawaian yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah			%	100	1,243,874,000	%	100	98,132,780	%	100	169,859,076	%	100	22,410,000	0	0	0	0		0.00		0.00	0.00	0.00	Rasionalisasi
	2.10.01.2.05.02					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				Paket	1	19,880,000	Paket	0	0	Paket	1	22,410,000	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rasionalisasi
	2.10.01.2.05.09					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				Orang	12	78,252,780	Orang	14	169,859,076	Orang	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rasionalisasi
	2.10.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah			%	100	2,205,729,313	%	96.3	202,685,761	%	100	265,218,322	%	100	262,271,500	100%	255,626,500	12.48%	27,164,500		133,923,700.00		133,923,700.00	0.00	52.39	
	2.10.01.2.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				Paket	1	17,794,500	Paket	1	22,646,500	Paket	1	13,285,000	1 Paket	13,285,000	0.0	0	1.00	12,010,000.00	1.00	12,010,000.00	100.00	90.40	
	2.10.01.2.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Paket	1	72,973,700	Paket	1	108,359,300	Paket	1	97,626,900	1 Paket	95,757,500	0.2	14,000,000	0.80	50,742,200.00	0.80	50,742,200.00	80.00	52.99	
	2.10.01.2.06.05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				Paket	1	16,638,000	Paket	1	17,648,000	Paket	1	20,186,000	1 Paket	17,699,000	0.0	0	1.00	15,450,000.00	1.00	15,450,000.00	100.00	87.29	

	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KETERANGAN		
								SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	TW 1		TW 2		KINERJA	Rp	KINERJA	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10						11			12		13		14						14		
	2.10.01.2.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				Dokumen	1	2,640,000	Dokumen	1	2,720,000	Dokumen	1	4,800,000	Dokumen	1	3,600,000	0.25	660,000	0.50	1,320,000.00	0.50	1,320,000.00	50.00	36.67		
	2.10.01.2.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Laporan	22	92,639,561	Laporan	24	113,844,522	Laporan	23	125,285,000	Laporan	23	125,285,000	4	12,504,500	9.00	54,401,500.00	9.00	54,401,500.00	39.13	43.42		
	2.10.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah			%	100	670,790,176	%	100	502,600,000	%	100	23,642,000	%	100	134,450,000	0	0	0.00%	0		0.00		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	Rasionalisasi	
	2.10.01.2.07.05					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				Unit	0	0	Unit	2	19,442,000	Unit	5	15,710,000	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rasionalisasi
	2.10.01.2.07.06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				Unit	9	502,600,000	Unit	1	4,200,000	Unit	3	118,740,000	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rasionalisasi
	2.10.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang tupoksi SKPD			%	100	118,953,000	%	0	0	%	0	0	%	100	12,900,000	100%	12,900,000	0.00%	0		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	2.10.01.2.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	12	12,900,000	Laporan	12	12,900,000	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2.10.01.2.08.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rasionalisasi

1	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KETERANGAN				
								SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	TW 1		TW 2		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10						11			12		13		14						14				
	2.10.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas fungsi SKPD			%	100	1,241,264,095	%	100	173,132,100	%	90.8	159,754,900	%	100	201,600,000	100%	200,170,000	16.67%	48,595,000		85,929,900.00		85,929,900.00	0.00	42.93					
	2.10.01.2.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Unit	4	141,292,100	Unit	4	139,969,900	Unit	4	180,180,000	4 Unit	180,180,000	1	48,400,000	77,004,900.00	48,400,000.00	77,004,900.00	48,400,000.00	1925122500.00	26.86					
	2.10.01.2.09.06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				Unit	30	31,060,000	Unit	28	19,005,000	Unit	30	19,980,000	30 Unit	19,090,000	0	0	8,535,000.00	0.00	8,535,000.00	0.00	28450000.00	0.00					
	2.10.01.2.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Unit	1	780,000	Unit	1	780,000	Unit	1	900,000	1 Unit	900,000	0.25	195,000	300,000.00	195,000.00	300,000.00	195,000.00	30000000.00	21.67					
	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH	Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas					%	100	10,653,070,003	%	88.25	915,195,716	%	92.58	1,047,744,898	%	77.33	1,118,920,000	100%	1,148,345,800	0.00%	29,610,806		169,471,912.00		169,471,912.00	0.00	14.76					
	2.10.10.2.01			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten /Kota	Persentase tanah aset Pemko Batam yang memiliki dokumen legalitas Persentase tanah masyarakat yang memiliki			%	100	10,653,070,003	%	88.25	915,195,716	%	92.58	1,047,744,898	%	77.33	1,118,920,000	100%	1,148,345,800	0.00%	29,610,806		169,471,912.00		169,471,912.00	0.00	14.76					

	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2022			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 (PER JUNI 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KETERANGAN		
								SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10						11			12		13		14						14		
					dokumen legalitas																											
	2.10.10.2.01.03					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1328	10,653,070,003	Dokumen	92	915,195,716	Dokumen	265	1,047,744,898	Dokumen	159	1,118,920,000	159 Dokumen	1,148,345,800	0	29,610,806	0.00	164,471,912.00	0.00	164,471,912.00					
										53,196,939,782			7,174,746,191			6,875,335,834			8,005,491,569		7,525,606,635		1,071,478,873		3,544,746,949		3,544,746,949					

Berdasarkan tabel evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan pencapaian periode Renstra tahun 2021-2026, sampai dengan tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa program kegiatan tidak dapat mencapai target yang diharapkan, tidak tercapainya target kegiatan penataan lahan kampung tua adalah dikarenakan persyaratan utama pengurusan sertifikat tanah masyarakat kampung tua tidak dapat terpenuhi karena tidak terbitnya Surat Rekomendasi sertifikat hak milik kampung tua oleh BP Batam.

Selain itu berkenaan dengan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia umumnya dan di Kota Batam khususnya membuat pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan perubahan besar-besaran terhadap struktur belanja prioritas pada seluruh Pemerintah Daerah melalui refocusing dan realokasi anggaran untuk digunakan dalam 3 (tiga) prioritas, yaitu penanganan Kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial/JPS. Dan hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2021-2026 telah disesuaikan dengan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana diatur pada Permendagri nomor 90 tahun 2019.

Program Penatagunaan Tanah hanya terdapat satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan, yaitu Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah/Kota, yang indikator kinerjanya terdapat 6 (enam) indikator, yaitu (1) jumlah dokumen sertifikat tanah aset Pemko Batam, (2) jumlah dokumen sertifikat lahan masyarakat, (3) jumlah kampung tua yang dilakukan pengukuran untuk proses sertifikasi lahan, (4) jumlah kegiatan fasilitasi pengurusan penggunaan kawasan hutan untuk PSU dan Aset Pemko Batam, (5) persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan, dan (6) persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu.

Realisasi kegiatan sampai dengan tahun 2024 diperkirakan dapat mencapai target yang diharapkan.

Tanah aset Pemko Batam yang sudah bersertifikat sampai dengan tahun 2024 adalah 528 dokumen atau 72,53% dari target 728 bidang tanah. Dan dengan target realisasi 50 dokumen di tahun 2024, diharapkan pada akhir tahun 2024 jumlah tanah aset Pemko Batam yang bersertifikat mencapai 627 dokumen atau 86,13% dari target 728 bidang tanah.

Sedangkan untuk pengurusan sertifikat tanah masyarakat periode tahun 2024 diperkirakan akan tercapai sesuai target, yaitu 100 dokumen dari target 600 dokumen selama periode tahun 2021-2026.

Penataan dan legalitas lahan kampung tua Kota Batam diperkirakan mencapai target yang ditetapkan, yaitu 10 kampung pada akhir tahun 2024. Sampai dengan tahun 2023 telah dilakukan penataan dan sertifikasi di 18 kampung tua.

B A B III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perencanaan strategi merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan.

dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Proses inilah yang akan menghasilkan rencana strategi (renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategik, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan RKPD Pemerintah Kota Batam Tahun 2024, visi Pembangunan Kota Batam tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera.

Misi dibutuhkan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi pembangunan Kota Batam, dan telah dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan Kota Batam. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendukung, Dinas Pertanahan yang mengemban tugas dan fungsi di bidang urusan pertanahan dalam pelaksanaan kegiatannya mendukung misi ke-5, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota Batam tahun 2024 dan dengan menelaah permasalahan pelayanan bidang pertanahan yang telah diuraikan diatas, beberapa faktor yang menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan bidang pertanahan adalah: (1) dualisme kewenangan; (2) belum tersedianya peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan; (3) masih rendahnya kesadaran dan dukungan masyarakat, serta (4) masih kurangnya SDM, sarana prasarana, dan alokasi anggaran.

Tujuan ini pada dasarnya merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, atau sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (1-5 tahunan). Tujuan yang telah dirumuskan Pemerintah Kota Batam terkait dengan pembangunan bidang pertanahan periode tahun 2021-2026 adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, dan mengayomi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan – tujuan yang telah dijabarkan dan semuanya itu akan diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran yang telah dirumuskan Pemerintah Kota Batam terkait dengan pembangunan bidang pertanahan periode tahun 2021-2026 adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Tujuan ini pada dasarnya merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, atau sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (1-5 tahunan). Adapun tujuan yang harus dicapai Dinas Pertanahan Kota tahun 2024 adalah Terwujudnya kualitas penatagunaan pertanahan Kota Batam.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan – tujuan yang telah dijabarkan dan semuanya itu akan diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran yang telah dirumuskan terkait dengan pembangunan bidang pertanahan tahun 2024 adalah: (1) Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas, dan (2) Meningkatnya tertib administrasi aset Pemko dan tanah masyarakat di Kota Batam. Adapun tujuan, sasaran, indikator sasaran, dan indikator program Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2024 disajikan pada tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Indikator Program
Dinas Pertanahan Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program	Target Kinerja Tahun 2024
1	Terwujudnya kualitas penatagunaan pertanahan Kota Batam	Meningkatnya tertib administrasi aset tanah Pemko dan tanah masyarakat di Kota Batam	Persentase tanah aset Pemko dan tanah masyarakat Kota Batam yang memiliki dokumen legalitas	Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas	77,33%
		Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100,00%

3.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024

Rincian Perubahan Rencana Kerja perubahan kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batam untuk mendukung tugas pokok dan fungsi instansi serta untuk mencapai target kinerja kegiatan adalah sebesar Rp. 7.543.313.866,- (Tujuh miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).

Adapun rencana program dan kegiatan tahun 2024 yang pembiayaannya melalui APBD Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diharapkan terjadi peningkatan kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran dan sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada program ini adalah:

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

Melalui Program Penatagunaan Tanah diharapkan terjadi peningkatan persentase penyelesaian legalitas lahan kampung tua di Kota Batam.

Kegiatan yang direncanakan pada program ini adalah Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.

TABEL T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan

Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab		
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				Target		Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	Semula	Menjadi			Nasional	Daerah			
2	10	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah an	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah an	100%	100%	100%	6,888,200, 169	6.377.260. 835	6.800.512. 066							100%	7.811.149. 511			
2	10	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi keuangan yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi keuangan yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah		100%	100%	6,254,568, 669	5.908.564. 335	6.314.327. 566							100%	6.862.576. 011			
2	10	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		392 Orang/b ulan	439 Orang/b ulan	6,214,648, 669	5.908.564. 335	6.314.327. 566	Kota Batam	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Pendap atan Asli Daerah (PAD)			ASN Dinas Pertanahan	448 Orang/B ulan	6.862.576. 011	Dinas Pertanahan		
2	10	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Ver ifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya tunjangan pelaksana penatausaha an dan pengujian/ve rifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD		1 Dokume n	0	39,920,00 0	0,00	0,00	Kota Batam	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Pendap atan Asli Daerah (PAD)			ASN Dinas Pertanahan	0	0	Dinas Pertanahan		



Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				Target	
					Menjadi	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
2	10	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		100%	0	22,410,00 0	0	0						100%	198.540.0 00		
2	10	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann ya	Tersedianya pakaian dinas ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	0	22,410,00 0	0	0	Kota Batam	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Pendap atan Asli Daerah (PAD)			ASN Dinas Pertanahan	0	0	Dinas Pertanahan
2	10	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya a pendidikan dan pelatihan pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	0	0	0	0	Kota Batam	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Pendap atan Asli Daerah (PAD)			ASN Dinas Pertanahan	18 Orang	198.540.0 00	Dinas Pertanahan
2	10	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tugas Pokok dan Fungsi SKPD		100%	100%	262,271,5 00	255.626.5 00	273.114.5 00						100%	375.855.0 00		



Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana		Prioritas				Target
					Menjadi	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
2	10	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera- ngan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener- angan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	13,285,00 0	13.285.00 0	13.285.00 0	Kota Batam	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Pendap- atan Asli Daerah (PAD)			ASN Dinas Pertanahan	1 Paket	13.073.00 0	Dinas Pertanahan
2	10	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan peralatan bahan pembersih kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka- n Kantor yang Disediakan		1 Paket	5 Paket	97.626.90 0	95.757.50 0	95.757.50 0	Kota Batam	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Pendap- atan Asli Daerah (PAD)			ASN Dinas Pertanahan	5 Paket	93.491.00 0	Dinas Pertanahan
2	10	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		0	0	0,00	0,00	0,00	Kota Batam	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Pendap- atan Asli Daerah (PAD)			ASN Dinas Pertanahan	0	0,00	Dinas Pertanahan
2	10	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	2 Paket	20.186.00 0	17.699.00 0	17.699.00 0	Kota Batam	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Pendap- atan Asli Daerah (PAD)			ASN Dinas Pertanahan	1 Paket	36.360.00 0	Dinas Pertanahan
2	10	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		1 Dokume- n	1 Dokume- n	4.800.000	3.600.000	3.600.000	Kota Batam	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Pendap- atan Asli Daerah (PAD)			ASN Dinas Pertanahan	1 Dokume- n	9.600.000	Dinas Pertanahan
2	10	01	206	09	Penyelenggar- aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggar- aan Rapat Koordinasi dan		23 Laporan	27 Laporan	125.285.0 00	125.285.0 00	142.773.0 00	Kota Batam	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Pendap- atan Asli Daerah (PAD)			ASN Dinas Pertanahan	23 Laporan	223.331.0 00	Dinas Pertanahan



Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				Target	
					Menjadi	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
							Konsultasi SKPD															
2	10	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah		100%	0	134.450.0 00	0	0						100%	160.872.0 00		
2	10	01	207	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		5 unit	0	15.710.00 0	0	0	Kota Batam	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Pendap atan Asli Daerah (PAD)			ASN Dinas Pertanahan	12 unit	45.954.00 0	Dinas Pertanahan
2	10	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkap an kantor dan gedung kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 Unit	0	118.740.0 00	0	0	Kota Batam	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Pendap atan Asli Daerah (PAD)			ASN Dinas Pertanahan	9 Unit	114.918.0 00	Dinas Pertanahan
2	10	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Tupoksi SKPD	Tersedianya Jasa Penunjang Tupoksi SKPD		100%	100%	12.900.00 0	12.900.00 0	12.900.00 0						100%	12.900.00 0		
2	10	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa berlanggana n telepon kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan		12 Laporan	1 Laporan	12.900.00 0	12.900.00 0	12.900.00 0	Kota Batam	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Pendap atan Asli Daerah (PAD)			ASN Dinas Pertanahan	1 Laporan	12.900.00 0	Dinas Pertanahan



Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				Target	
					Menjadi	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
							Listrik yang Disediakan															
2	10	01	208		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya keikutsertaan dalam pawai mobil hias	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	0	0,00	0	0	Kota Batam	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			ASN Dinas Pertanahan	0	0,00	Dinas Pertanahan
2	10	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100%	100%	201.600.000	200.170.000	200.170.000						ASN Dinas Pertanahan	100%	200.406.500	
2	10	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas dan tersedianya dokumen legalitas kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 Unit	4 Unit	180.180.000	180.180.000	180.180.000	Kota Batam	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			ASN Dinas Pertanahan	4 Unit	178.566.500	Dinas Pertanahan



Kode						Urusan/Bidang g Urusan/ Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				Target	
							Menjadi	Semula		Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional		Daerah		
2	10	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharaan ya peralatan kerja kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		30 Unit	27 Unit	19.980.00 0	19.090.00 0	19.090.00 0	Kota Batam	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Pendap atan Asli Daerah (PAD)			ASN Dinas Pertanahan	30 Unit	20.940.00 0	Dinas Pertanahan	
2	10	01	209	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya a jasa berlanggana n retribusi sampah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi		1 Unit	1 Unit	900.000	900.000	900.000	Kota Batam	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Pendap atan Asli Daerah (PAD)			ASN Dinas Pertanahan	1 Unit	900.000,0 0	Dinas Pertanahan	
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNA AN TANAH	Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas	Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas	100%	77,33%	77.33%	1.118.920. 000	1.148.345. 800	742.801.8 00						83,33%	1.179.859. 900			
2	10	10	201		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase tanah aset Pemko Batam yang memiliki dokumen legalitas	Persentase tanah aset Pemko Batam yang memiliki dokumen legalitas		77.33%	77.33%	1.118.920. 000	1.148.345. 800	742.801.8 00						83,33%	1.179.859. 900			



Kode					Urusan/Bidan g Urusan/ Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				Target	
						Menjadi	Semula		Menjadi	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah			
2	10	10	201	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sertifikat lahan aset Pemko Batan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota		159 Dokume n	150 Dokume n	1.118.920. 000	1.148.345. 800	742.801.8 00	Kota Batam	Kota Batam, Batam Kota, Belian	Pendap atan Asli Daerah (PAD)	Mempe rkuat infrastru ktur untuk menduk ung pengem bangan ekonom i dan pelayan an dasar	Peningk atan dan Fasilitasi Investas i Berbasis Maritim dan Keungg ulan Wilayah	Tanah Aset Pemko Batam, Lahan Masyarakat Hinterland Kota Batam, Kampung Tua Kota Batam	159 Dokume n	1.179.859. 900	Dinas Pertanahan

3.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (hasil inputan SIPD)

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan yang dirumuskan.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dalam hal ini 1 (satu) tahun yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sedangkan indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun rencana program dan kegiatan tahun 2024 yang pembiayaannya melalui APBD Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Program Penatagunaan Tanah

Kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang telah dilaksanakan mulai tahun 2011, namun dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 tahun 2019 terjadi perubahan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan ini adalah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota.

Pada sub kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakannya kegiatan pengadaan dokumen lahan aset pemerintah Kota, sertifikasi tanah aset masyarakat di wilayah hinterland, pengadaan lahan aset Pemerintah Kota Batam, dan terlaksananya penataan lahan kampung tua Kota Batam.

Kegiatan pengadaan dokumen lahan aset pemerintah Kota Batam ini dilaksanakan dengan cara menginventarisasi kelengkapan administrasi lahan aset Pemko Batam yang meliputi dokumen PL, SPJ skeep, rekomendasi, dan sertifikat lahan. Untuk lahan aset yang terdata tidak memiliki dokumen PL, SPJ Skeep dan Rekomendasi akan dilakukan pengajuan/pengusulan dokumen dimaksud ke BP

Batam. Sedangkan untuk lahan yang sudah memiliki kelengkapan dokumen PL, SPJ skep dan rekomendasi selanjutnya akan dilakukan pengusulan/pengurusan dokumen sertifikat lahan ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN). Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan instansi Badan Pengusahaan Batam sebagai pengelola lahan di Pulau Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) sebagai instansi yang berwenang menerbitkan sertifikasi lahan.

Rangkaian kegiatan pengurusan sertifikat lahan masyarakat adalah (1) Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) mengenai mekanisme sertifikasi lahan, (2) Koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan lokus, (3) Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan sertifikasi lahan, (4) bersama dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) melakukan survey dan pengukuran lokasi, dan (5) Pendaftaran berkas lahan ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN).

Untuk kegiatan penataan lahan kampung tua, rencananya akan dilaksanakan pengukuran lahan masyarakat kampung tua untuk sertifikasi hak atas tanah masyarakat pada 3 (tiga) lokasi kampung tua yang sudah keluar rekomendasi sertifikasi hak atas tanah dari BP Batam.

Rincian rencana kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah tahun 2024 sebagai berikut :

Input	: Rp. 742.801.800,-
Output	: Jumlah dokumen sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Batam 150 Dokumen, jumlah dokumen sertifikat tanah masyarakat 100 dokumen pengadaan dokumen lahan aset pemko batam 50 Dokumen dan penataan lahan kampung tua di 9 Kampung
Outcome	: Jumlah dokumen sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Batam 150 Dokumen, jumlah dokumen sertifikat tanah masyarakat 100 dokumen pengadaan dokumen lahan aset pemko batam 50 Dokumen dan penataan lahan kampung tua di 9 Kampung
Benefit	: Tersedia data-data lahan yang memudahkan

dalam perencanaan pembangunan, dan tertib administrasi pertanahan

Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pembangunan

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya termasuk dalam Belanja Tidak Langsung dimana terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

a.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pada sub kegiatan ini terdapat belanja gaji dan tunjangan ASN, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Input : Rp. 6.314.327.566,-

Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Outcome : Meningkat kinerja dan pelayanan aparatur.

Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

b. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya termasuk dalam anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU) dimana terdiri dari 5 (enam) sub kegiatan, yaitu:

b.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Rincian kegiatan sebagai berikut :

Input : Rp. 13.285.000,-

- Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.
- Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
- Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
- Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

b.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rincian kegiatan sebagai berikut:

- Input : Rp. 95.757.500,-
- Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.
- Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
- Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
- Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

b.3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan

Rincian kegiatan sebagai berikut:

- Input : Rp. 17.699.000,-
- Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
- Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
- Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
- Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.



b.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Rincian kegiatan sebagai berikut :

Input	: Rp. 3.600.000,-
Output	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.
Outcome	: Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit	: Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact	: Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

b.5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Rincian kegiatan sebagai berikut:

Input	: Rp. 142.773.000,-
Output	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Outcome	: Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit	: Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact	: Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

c. *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya termasuk dalam anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU) dimana terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

c.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rincian kegiatan sebagai berikut :

Input	: Rp. 12.900.000,-
Output	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.
Outcome	: Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit	: Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact	: Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

d. *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya termasuk dalam anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU) dimana terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

d.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Rincian kegiatan sebagai berikut :

Input	: Rp. 180.180.000,-
Output	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Outcome	: Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit	: Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact	: Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

d.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Rincian kegiatan sebagai berikut:

Input	: Rp. 19.090.000,-
Output	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Outcome	: Meningkatkan kinerja dan pelayanan

- aparatur.
- Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
- Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

d.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rincian kegiatan sebagai berikut :

- Input : Rp. 900.000,-
- Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
- Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
- Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
- Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

Unit Organisasi : 2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi : 2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN

Unit Organisasi : 2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi : 2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Kota Batam, Batam Kota, Belian	-	1 Paket	100 %	13.285.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.073.000,00
2	10	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Kota Batam, Batam Kota, Belian	-	5 Paket	100 %	95.757.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	93.491.000,00
2	10	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Kota Batam, Batam Kota, Belian	-	2 Paket	100 %	17.699.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36.360.000,00
2	10	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Kota Batam, Batam Kota, Belian	-	1 Dokumen	100 %	3.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9.600.000,00
2	10	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Kota Batam, Batam Kota, Belian	-	27 Laporan	100 %	142.773.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	223.331.000,00
2	10	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							134.450.000,00					160.872.000,00	
2	10	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	Kota Batam, Batam Kota, Belian	-	-	-	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	45.954.000,00
2	10	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	Kota Batam, Batam Kota, Belian	-	-	-	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	114.918.000,00
2	10	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								12.900.000,00					25.875.000,00
2	10	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang tupoksi SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Belian	-	1 Laporan	100 %	12.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.900.000,00
2	10	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya jasa penunjang tupoksi SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Belian	-	-	-	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	0,00
2	10	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								200.170.000,00					200.406.500,00
2	10	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas fungsi SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Belian	-	4 Unit	100 %	180.180.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	178.566.500,00	
2	10	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas fungsi SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Belian	-	27 Unit	100 %	19.090.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	20.940.000,00	
2	10	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas fungsi SKPD	Kota Batam, Batam Kota, Belian	-	1 Unit	100 %	900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Unit	900.000,00	
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH								742.801.800,00					1.179.859.900,00	
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota								742.801.800,00					1.179.859.900,00	
2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota														
						Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas Persentase tanah aset Pemko Batam yang memiliki dokumen legalitas	Kota Batam, Batam Kota, Belian	77,33 %	150 Dokumen	77,33 %	742.801.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Dokumen	1.179.859.900,00	
TOTAL													8.005.491.569,00				9.122.635.176,00		

B A B IV

P E N U T U P

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2024 ini selanjutnya menjadi dasar perumusan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2024. Tujuan penyusunan Perubahan Renja dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2024.

Perubahan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan pencapaian indikator renstra sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Selain itu, mengingat waktu pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2024 sangat terbatas, hanya pada Triwulan IV Tahun 2024, maka perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif dan pengendalian secara cermat dan berkualitas untuk semua kegiatan baik kegiatan dalam penetapan maupun perubahan. Sehingga semua kegiatan dapat selesai dilaksanakan sesuai rencana serta memenuhi capaian indikator baik dalam RPJMD maupun Renstra.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2024 ini dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan triwulan II. Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.

Dalam menyikapi perkembangan Kota Batam saat ini, maka perlu diambil langkah-langkah strategis agar tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Batam dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Renja Kerja (Renja) Dinas Pertanahan. Langkah-langkah strategis tersebut antara lain:

1. Mempersiapkan Dinas Pertanahan Kota Batam sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016, tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam;

2. Melakukan koordinasi internal untuk evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2024 sehingga menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2025;
3. Mengambil dan menetapkan kebijakan yang dapat mendukung program kerja Walikota Batam di bawah koordinasi Sekretariat Daerah Kota Batam;
4. Menyusun dan menetapkan langkah-langkah strategis dimasa datang berdasarkan evaluasi kerja;
5. Meningkatkan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi vertikal seperti kantor Pertanahan Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk perencanaan penatagunaan lahan di Kota Batam umumnya serta penyelesaian sertipikasi tanah aset Pemko Batam dan penataan kampung tua di Kota Batam pada khususnya;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengirim petugas teknis dan staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
7. Penambahan dan penempatan tenaga teknis sesuai dengan latar belakang pendidikan teknis guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan tugas-tugas dinas.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2024 ini dibuat, semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2025;

2. Menyusun dan menetapkan langkah-langkah strategis dimasa datang berdasarkan evaluasi kerja;
3. Meningkatkan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi vertikal seperti kantor Pertanahan Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk perencanaan penatagunaan lahan di Kota Batam umumnya serta penyelesaian sertipikasi tanah aset Pemko Batam dan penataan kampung tua di Kota Batam pada khususnya;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengirim petugas teknis dan staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
5. Penambahan dan penempatan tenaga teknis sesuai dengan latar belakang pendidikan teknis guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan tugas-tugas dinas.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2024 ini dibuat, semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kota Batam

No	JenisKegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.		√		
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.		√		
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.		√		
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		√		
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota.	√			

No	JenisKegiatan	HasilPengendaliandanEvaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.		√		
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

Batam, 12 Juli 2024

KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM,

NURZALIE, AP, S.Sos
NIP. 19730206 199311 1 001



**PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERTANAHAN**

Kantor Dinas Bersama Lt.IV jalan Raja Isa No. 17 Batam Centre
Telepon/ Faksimile : (0778) 470597, 470596
Email : pertanahan@batam.go.id, Website : dispertanahan.batam.go.id
B A T A M



Kode Pos: 29464

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANAHAN TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) DINAS PERTANAHAN TAHUN 2024**

DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan Tahun 2025 dan Program dan Kegiatan Perubahan Dinas Pertanahan Tahun 2024, perlu disusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Tahun 2024;
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Tahun 2024, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) dengan menetapkan keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Infonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tahun 2024.

KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tahun 2024 terdiri dari pejabat dilingkungan Dinas Pertanian Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Tahun 2024 dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Batam

Pada tanggal 07 Desember 2023

**KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM,**



NURZALIE, AP., S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19730206 199311 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERTANAHAN KOTA BATAM
NOMOR : 22 Tahun 2023
TANGGAL : 07 Desember 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANAHAN TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) DINAS PERTANAHAN TAHUN 2024

JABATAN	JABATAN DALAM TIM
KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM	Pengarah
SEKRETARIS DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM	Penanggungjawab
ANALIS HUKUM PERTANAHAN (sebagai pelaksana tugas dan fungsi Analis Keuangan Pusat dan Daerah serta Perencana)	Sekretaris
KEPALA BIDANG PENATAGUNAAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH	Anggota
KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DAN PENGADAAN TANAH	Anggota
KEPALA BIDANG PENGAWASAN PERTANAHAN DAN PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN	Anggota
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Anggota

KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM,

NURZALIE, AP., S.Sos
B Pembina Utama Muda
NIP. 19730206 199311 1 001